

RANI RAHMAYUNI SIREGAR

by Jubed Turnitin

Submission date: 18-Oct-2023 01:22AM (UTC-0400)

Submission ID: 2193227572

File name: RANIRAHMAYUNISIREGAR.docx (32.8K)

Word count: 3708

Character count: 24700

Analysis of the Internal Control System on Accounting and Taxation System of Cash Receipts and Expenditures at PT Jasa Raharja Lampung Branch Office

Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi dan Perpajakan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung

Rani Rahmayuni Siregar¹, Damayanti², Maryani^{3*}

^{1,3}. Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Negeri

Lampung. ². Program Studi Akuntansi Bisnis Digital, Jurusan Ekononmi dan Bisnis Politeknik

Negeri Lampung. Email: ranirahmaa09@gmail.com, damayanti@polinela.ac.id,

maryani@polinela.ac.id

Abstract

This research aims to explain the accounting and taxation system of cash revenue and expenditure at PT Jasa Raharja Lampung Branch Office and analyze the principles of the integrated framework of COSO internal control of the accounting and taxation system of cash revenue and expenditure at PT Jasa Raharja Lampung Branch Office. The data used in this research are primary data and secondary data. The data collection methods used are interviews and documentation. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the research result, it can be concluded that the accounting and taxation system for cash revenue and expenditure at PT Jasa Raharja, Lampung Branch Office, is in accordance with the accounting system established by the company and the implementation of the internal control system for the accounting and taxation system for cash revenue and expenditure at PT Jasa Raharja Lampung Branch Office in general is in accordance with the COSO Internal Control Integrated Framework.

Keywords: Accounting and Taxation System, Internal Control System, COSO Internal Control Integrated Framework

Pendahuluan

Dalam industri asuransi Indonesia belakangan ini, terjadi peningkatan kasus gagal bayar yang menjadi tantangan utama (Kompas, 2023). Beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK), Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan Asuransi Jiwasraya juga menghadapi kasus serupa (Aprilia, 2023). Pengamat hukum

berpendapat bahwa masalah ini berkaitan dengan permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal melibatkan manajemen perusahaan asuransi yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan cermat (Aprilia, 2023). GCG sangat penting, terutama seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 yang mengatur Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) (Kementerian BUMN, 2023). PT Jasa Raharja, sebagai perusahaan Asuransi Sosial BUMN, bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi berbagai jenis transportasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Sebagai perusahaan BUMN, PT Jasa Raharja perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan GCG. Konsep ini diperkenalkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) pada tahun 1985 untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecurangan dalam laporan keuangan. Pada tahun 1992, COSO merilis kerangka kerja Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi, yang dikenal dengan *COSO Internal Control – Integrated Framework* (Mulyadi, 2017). Kerangka ini diperbaharui pada tahun 2013 dengan perubahan teori dan prinsip-prinsip pengendalian intern.

Sistem pengendalian internal erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan. Sistem akuntansi didesain untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya (En dan Suryandi, 2011). Salah satu bagian dari sistem akuntansi adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sebagai BUMN, PT Jasa Raharja harus menjaga reputasi perusahaan agar tetap bersih dan terhindar dari kecurangan (Putri, 2016).

Penelitian Putri (2016) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Bogor sesuai

dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun, masih ada kelemahan dalam prosedur penerimaan kas, survei, dan pelayanan. Sementara itu, penelitian Pakpahan (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian penerimaan premi dan pengeluaran polis di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Medan telah berjalan baik, tetapi pencatatan harian kas sebaiknya dilakukan oleh bagian keuangan, bukan bagian kasir.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung serta menganalisis implementasi prinsip-prinsip kerangka terintegrasi pengendalian intern COSO terhadap sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas di kantor tersebut.

Kajian Pustaka

Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2016), akuntansi merupakan suatu proses yang mencakup identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Pada dasarnya, akuntansi berperan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan

guna memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Hal ini menggambarkan akuntansi sebagai bahasa dari dunia bisnis, di mana informasi bisnis disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Warren, et. al., 2018).

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang melibatkan formulir, catatan, dan laporan yang tersusun dengan baik untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan (Mulyadi, 2017).

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) bisa dianggap sebagai alat cerdas yang menghadirkan informasi dari bahasa akuntansi (Romney dan Steinbart, 2016).

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas mengacu pada dua sumber utama penerimaan kas perusahaan, yaitu dari penjualan tunai dan piutang. Penjualan tunai mencakup *over-the-counter sale*, *cash-on-delivery sale*, dan penjualan dengan kartu kredit. Penerimaan kas dari piutang melibatkan penagihan melalui berbagai metode, seperti *kantor pos* dan *lock box collection plan* (Mulyadi, 2017).

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas biasanya melibatkan penggunaan cek. Namun, untuk pengeluaran yang nilainya kecil, perusahaan dapat menggunakan dana kas kecil dengan salah satu dari dua sistem, yaitu *fluctuating-fund-balance system* dan *imprest system* (Mulyadi, 2017).

Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib yang harus diserahkan kepada negara oleh individu atau badan usaha sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kementerian Keuangan, 2009).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Kementerian Keuangan, 2008).

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada individu terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan (Kementerian Keuangan, 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan dalam konteks pembelian barang (Kementerian Keuangan, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa hadiah, deviden, sewa, royalti, dan jasa lainnya, kecuali yang termasuk dalam PPh Pasal 21 (Kementerian Keuangan, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 24 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan pajak atas penghasilan terkait dengan jenis jasa

tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya (Kementerian Keuangan, 2021).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi dalam wilayah pabean, dengan tarif yang bervariasi pada setiap tahap produksi dan distribusi (Kementerian Keuangan, 2022).

Sistem Pengendalian Internal

Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, adalah proses yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi yang terus menerus dilakukan oleh manajemen dan pegawai untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, efisiensi dan keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset organisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan (Mulyadi, 2017).

Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO

Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO adalah panduan yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang beranggotakan berbagai organisasi akuntansi dan keuangan terkemuka. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal yang diakui secara luas sebagai panduan pengendalian internal dalam bisnis. Pada tahun 2013, kerangka tersebut diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam bisnis dan teknologi, dengan

menjelaskan lima komponen utama: lingkungan internal, penilaian risiko dan respons risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan (Mulyadi, 2017).

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif, istilah "populasi" digantikan dengan "*social situation*," yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas, yang berinteraksi dalam sebuah konteks tertentu (Spradley, seperti yang disebut dalam Sugiyono, 2019). Dalam konteks ini, penelitian menetapkan "tempat" sebagai PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, "pelaku" sebagai PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung itu sendiri, dan "aktivitas" sebagai sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana data diperoleh langsung dari Bidang Operasional dan Bidang Keuangan, Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial (TJSL) PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data. Sumber data meliputi data sekunder yang terdiri dari catatan dan dokumen resmi PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, *flowchart*, formulir, dan

dokumen lainnya. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Proses analisis data melibatkan tahapan data reduction, data display, dan *conclusion drawing or verification* (Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas beroperasi di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip kerangka terintegrasi pengendalian internal COSO dalam konteks sistem tersebut.

Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung

Aktivitas terkait penerimaan dan pengeluaran uang tunai di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung terekam menggunakan perangkat lunak *Enterprise Resource Planning* (ERP) bernama *Oracle e-Business Suite*. *Oracle e-Business Suite* berfungsi sebagai alat untuk memantau pendapatan secara *real-time*, menyederhanakan identifikasi data, menghindari ketidaksesuaian data, memelihara integritas data, dan mempermudah proses pelaporan.

Oracle e-Business Suite memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan berbagai aplikasi lain yang digunakan di PT

Jasa Raharja. Aplikasi ini memungkinkan pengambilan data transaksi dari berbagai sistem sekitarnya yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan, termasuk transaksi kas dan bank (DASI-R), investasi (*Fund Management System/FMS*), pendapatan (DASI-JR), pengadaan (*E-Procurement*), beban (DASI-JR), serta anggaran (*E-Budgeting*).

Penerapan *Oracle e-Business Suite* memungkinkan perusahaan untuk mematuhi Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti PSAK 71, PSAK 73, dan PSAK 74. *Oracle e-Business Suite* juga mencakup fitur Standar Laporan Keuangan Internasional (IFRS) untuk menstandarisasi laporan keuangan.

Sejak tahun 2019, PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung telah mengimplementasikan layanan keuangan berbasis digital, yang dikenal sebagai pembayaran non-tunai. Pihak PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung memproses santunan dengan menggunakan metode non-tunai, di mana santunan dana diteruskan secara langsung ke rekening korban atau ahli waris korban melalui *virtual account*. Selain mengubah cara layanan, PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung juga telah menerapkan transformasi digital dalam hal pendapatan, khususnya dalam hal iuran wajib dan sumbangan wajib.

Kegiatan penerimaan uang tunai di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung mencakup dua jenis utama, yakni penerimaan uang dari transaksi *underwriting* dan transaksi

non-underwriting. Di sisi lain, kegiatan pengeluaran uang tunai di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung melibatkan pembayaran klaim, pengeluaran langsung, persekot, perpajakan, dan gaji karyawan. Adapun transaksi terkait investasi dan aset tetap hanya terjadi di PT Jasa Raharja Kantor Pusat.

Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung

Sistem akuntansi yang digunakan oleh PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung telah sepenuhnya menyelaraskan dengan pengendalian internal. Semua penerimaan, termasuk yang berasal dari Iuran Wajib seperti Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) yang diterima dari operator alat transportasi dan juga penerimaan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari Kantor Pelayanan Samsat, telah diotorisasi dan disetujui oleh Kepala Bagian Operasional PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung. Semua data ini telah diintegrasikan ke dalam sistem Data Korporasi Jasa Raharja (DASI-JR). Setelahnya, Staf Bagian Keuangan, Akuntansi, dan Tanggung Jawab Sosial (TJSL) PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung mengambil data ini dari aplikasi ERP Oracle e-Business Suite yang terhubung ke sistem Data Korporasi Jasa Raharja (DASI-JR). Penerimaan yang berasal dari pembayaran

melalui kartu dana dan denda juga telah disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sebelum dicatat dalam aplikasi ERP Oracle e-Business Suite oleh Staf Bagian Keuangan, Akuntansi, dan TJSL PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

Proses pengeluaran uang tunai dalam bentuk klaim telah sepenuhnya disahkan oleh Kepala Bagian Operasional PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung dan diintegrasikan ke dalam sistem Data Korporasi Jasa Raharja (DASI-JR). Kemudian, Staf Bagian Keuangan, Akuntansi, dan TJSL PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung mengekstraksi data ini dari aplikasi ERP Oracle e-Business Suite yang terhubung ke sistem Data Korporasi Jasa Raharja (DASI-JR). Data ini kemudian diperiksa kembali oleh Kepala Bagian Administrasi PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, yang bertindak sebagai pemegang anggaran, dan diperiksa oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Akuntansi, dan TJSL PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sebagai verifikator. Akhirnya, data ini disahkan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

Kegiatan pengeluaran uang tunai untuk pembayaran langsung, persekot, perpajakan, dan gaji karyawan juga dicatat dalam aplikasi ERP Oracle e-Business Suite oleh Staf Bagian Keuangan, Akuntansi, dan TJSL PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung. Data ini kemudian diperiksa oleh Kepala Bagian Administrasi PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sebagai pemegang anggaran, serta diperiksa oleh Kepala Sub Bagian Keuangan,

Akuntansi, dan TJSJL PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sebagai verifikator, sebelum akhirnya disahkan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

Analisis Kerangka Terintegrasi Pengendalian Intern COSO terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung mencakup berbagai aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO. Perusahaan ini telah mengadopsi filosofi dan pola operasi manajemen yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan komitmen untuk menjaga integritas dan etika sebagai nilai inti. Mereka telah menetapkan struktur organisasi yang jelas di dalam lingkungan cabang Lampung, termasuk garis pelaporan, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman perusahaan. Upaya juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan dengan standar kompetensi dan menerapkan kebijakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat di dalam lingkungan PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dalam lingkungan internal PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, seperti ketidakpartisipasian Dewan Komisaris atau Komite Audit PT Jasa Raharja ketika Satuan Pengawasan

Intern (SPI) menjalankan audit di berbagai kantor cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia.

2. Penilaian Risiko dan Respons Risiko

Untuk mencegah atau mengurangi potensi ketidakwajaran dalam laporan keuangan, PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung melakukan evaluasi risiko yang dapat muncul dalam sistem dan prosedur operasionalnya. Risiko yang dapat terjadi atau berubah beserta penilaiannya meliputi:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasional PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, seperti pengenalan sistem akuntansi baru oleh manajemen perusahaan, yang mungkin menimbulkan kebingungan di kalangan staf dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
- b. Pengenalan atau pembaruan sistem informasi sesuai dengan Surat Ketetapan (SK) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini sering menjadi masalah karena sistem informasi tersebut berkaitan dengan proses transaksi perusahaan dalam pertukaran informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas.
- c. Ketidaksesuaian antara penerimaan kas dan data aktual, memicu pemeriksaan ulang oleh staf bagian keuangan, akuntansi, dan Tanggung Jawab Sosial (TJSJL) PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sebelum melakukan pencatatan

jurnal.

PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung telah mengelola risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif, mengenali kemungkinan dan dampak risiko, serta menghindari risiko dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat menciptakan risiko, sesuai dengan salah satu metode respons risiko yang terdapat dalam Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO.

3. Aktivitas Pengendalian

Sistem pengendalian di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung telah diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mereka telah melakukan proses otorisasi dan kegiatan yang memenuhi standar oleh personel yang memiliki wewenang, menjalankan pemisahan tanggung jawab untuk mengurangi risiko kesalahan, kecurangan, dan pemborosan, mencatat setiap transaksi dan aktivitas dengan akurat dan tepat waktu, serta menjaga dokumen yang rapi mengenai transaksi dan pengendalian internal. Mereka juga menerapkan pembatasan akses dan mengawasi sumber daya dan catatan perusahaan dengan tujuan mengendalikan sumber daya yang ada. Selain itu, setiap tahun, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dari Kantor Pusat PT Jasa Raharja Jakarta mengunjungi kantor-kantor cabang dan perwakilan untuk melakukan audit

internal dan memastikan kepatuhan terhadap pengendalian.

Tujuan dari audit internal ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menjalankan pengendalian internalnya. Namun, manajemen, staf, dan karyawan di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengawasan internal ini. Mereka menerapkan tiga lapisan pengendalian dalam aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, dengan Kepala Bagian Administrasi sebagai pemegang anggaran, Kepala Sub Bagian Keuangan, Akuntansi, dan TJSL sebagai verifikator, dan pengesahan oleh Kepala Cabang.

Kegiatan pengendalian yang diterapkan di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sesuai dengan berbagai kategori prosedur pengendalian yang ada dalam Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO. Ini mencakup otorisasi dan kegiatan yang memenuhi standar, pemisahan tugas, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan dalam pengendalian manajemen, penggunaan dan pembuatan dokumen serta catatan, pengamanan aset, dokumen, dan data, serta pengecekan independen atas kinerja.

4. Informasi dan Komunikasi

PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung telah mengadopsi sistem informasi yang berbasis pada situs web yang dikenal sebagai Data Korporasi

Jasa Raharja (DASI-JR). DASI-JR adalah suatu sistem informasi yang komprehensif dan terpadu yang mendukung berbagai aspek kegiatan operasional perusahaan. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pelayanan yang terkait dengan operasi PT Jasa Raharja.

Selain itu, PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung juga menerapkan sistem informasi akuntansi yang dikenal sebagai Enterprise Resource Planning (ERP) *Oracle e-Business Suite*. Sistem ini digunakan untuk berbagai transaksi keuangan seperti pendapatan, klaim, investasi, pengeluaran langsung, persekot, aset tetap, perpajakan, dan penggajian. Aplikasi ERP *Oracle e-Business Suite* memungkinkan perusahaan untuk memantau pendapatan secara *real-time*, memudahkan identifikasi data, menghindari inkonsistensi data, serta menyediakan fasilitas pelaporan yang efisien. Selain itu, aplikasi ini dapat mematuhi berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 1964, Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, PSAK 71, PSAK 73, dan PSAK 74. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur *International Financial Report Standard* (IFRS) yang digunakan untuk memenuhi standar pelaporan keuangan internasional.

Sistem informasi akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan telah berfungsi dengan sangat baik dan menekankan pada keandalan dan

kualitas informasi serta efektivitas komunikasi. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi perusahaan dapat memahami tugas mereka dengan baik, berkoordinasi dengan unit internal lain yang relevan, dan menjalin komunikasi dengan pihak eksternal. Sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO, seperti menyediakan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal, berkomunikasi secara internal tentang tujuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mendukung elemen-elemen pengendalian internal lainnya, serta berkomunikasi informasi pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal.

5. Pengawasan

Pengawasan merujuk pada proses penilaian berkala terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam periode waktu tertentu. Setiap unit kerja di PT Jasa Raharja (Persero) memiliki kewajiban untuk mengadakan kegiatan pengawasan atas Pengendalian Intern yang sesuai dengan Pedoman Evaluasi Pengendalian Intern dan panduan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Jasa Raharja (Persero), yang diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP/149/2016 tentang Standar Prosedur Operasional Satuan Pengawasan Intern (SPO-SPI). Pengawasan ini melibatkan pemantauan

rutin, evaluasi terpisah, dan pengawasan bertahap.

Di PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung, pengawasan terhadap kinerja pengendalian intern diawasi oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung. Monitoring rutin dilakukan sehari-hari untuk mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung. Evaluasi terpisah dilaksanakan bulanan, yaitu melalui Analisa dan Evaluasi Bulanan yang mencakup penilaian menyeluruh. Pada akhir bulan, setelah selesainya semua pekerjaan, evaluasi dilakukan, terutama ketika pegawai dari Kantor Pelayanan Samsat mengunjungi Kantor Cabang.

Selain itu, terdapat juga pengawasan berjenjang yang mencakup berbagai tingkat operasional, mulai dari tingkat pelaksana hingga tingkat kebijakan. Hasil evaluasi ini dijadikan laporan tahunan perusahaan. Bagian pengawasan tingkat perusahaan diselenggarakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan menggunakan laporan tindak lanjut yang diajukan oleh unit kerja setiap tiga bulan. Laporan ini mencakup tindakan yang telah dilakukan, diselesaikan, dan rencana yang akan ditindaklanjuti oleh manajemen unit kerja yang bersangkutan.

Pendekatan yang diterapkan ini sejalan dengan beberapa metode utama dalam Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO, termasuk evaluasi SPI,

pelaksanaan pengawasan yang efektif, pemantauan aktivitas sistem, dan pelaksanaan audit secara berkala.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sudah sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b. Pelaksanaan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung secara umum sudah sesuai dengan Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan prinsip kerangka terintegrasi pengendalian internal COSO, Dewan Komisaris atau Komite Audit dari PT Jasa Raharja diharapkan dapat ikut berpartisipasi langsung saat Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan audit di kantor cabang dan perwakilan seluruh Indonesia.
- b. Berkaitan dengan prinsip kerangka terintegrasi pengendalian internal COSO, PT Jasa Raharja Kantor Cabang

Lampung diharapkan dapat membentuk unit kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Kantor Cabang agar dapat mencegah dan menanggulangi kesalahan yang terjadi dengan segera.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Aprilia, Z. 2023. Terkuak, 2 Biang Kerok Yang Bikin Banyak Asuransi Bermasalah. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. 2023. *PPh Pasal 21*.
- En, K. T., & Suryandi, F. A. 2011. Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern Aktivitas Pembelian Bahan Baku Guna Mencapai Penyerahan Bahan Baku yang Tepat Waktu (Studi Kasus pada Perusahaan "X" Bandung). *diakses tanggal 18 Juli 2023*
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara*.
- Kementerian Keuangan Learning Center. 2023. *Pajak Pertambahan Nilai*.
- KPPN Kotabumi. 2023. *PPh Pasal 23*.
- KPPN Kotabumi. *Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)*.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Jasa Raharja Lindungi Kita*.
- Pakpahan, L. W. 2022. Analisis Sistem Pengendalian Intern Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja Perwakilan Medan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ditetapkan tanggal 28 Agustus 2008. Berlaku tanggal 28 Agustus 2008.
- Putri, S. E., & Setiawan, A. B. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Bogor. *Jurnal Akunida*, 2(1), 27-42.
- Romney & Steinbart. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni & Jusuf. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.

RANI RAHMAYUNI SIREGAR

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	9%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	unida.ac.id	4%
Internet Source		
2	repository.usd.ac.id	1%
Internet Source		
3	eprints.pknstan.ac.id	1%
Internet Source		
4	jurnal.polinela.ac.id	1%
Internet Source		
5	journal.unimar-amni.ac.id	1%
Internet Source		
6	www.madaninews.id	1%
Internet Source		
7	core.ac.uk	1%
Internet Source		
8	www.researchgate.net	1%
Internet Source		
9	digilibadmin.unismuh.ac.id	1%
Internet Source		

10

repository.uhn.ac.id

Internet Source

1 %

11

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Student Paper

1 %

12

journal.sekawan-org.id

Internet Source

1 %

13

mhs2007bersama.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

RANI RAHMAYUNI SIREGAR

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
